

**ANALISIS ANGGARAN KINERJA SEKTOR PUBLIK PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



Nama : Kelfani
NIM : 222014235

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019

**ANALISIS ANGGARAN KINERJA SEKTOR PUBLIK PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Kelfani
NIM : 222014235**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kelfani
NIM : 222014235
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan pejiplakan (plagiat) karya orang lain. Apabila terbukti di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang, 2019

Yang Membuat Pernyataan


Kelfani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Anggaran Kinerja Sektor Publik Pada Dinas
Perhubungan Kota Palembang
Nama : Kelfani
NIM : 222014235
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, **Maret** 2019

Pembimbing I,



Betri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

Pembimbing II,



Mizan, S.E., Ak., M.Si
NIDN/NBM : 0206047101/859196

Mengetahui,
Dekan
U.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- *Belajarlh dari kekeliruan di masa lalu, mencoba bersama dengan cara yang berbeda dan senantiasa berharap untuk sebuah kesuksesan di masa depan*
- *Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua*

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ **Mama & Papa**
- ❖ **Kakak & Adek**
- ❖ **Saudara-saudara ku**
- ❖ **Dosen-dosen FEB UMP**
- ❖ **Sahabat - sahabat**
- ❖ **Almamater**

PRAKATA



Assalamualikum Wr. Wb

Alhamdulillahilahirabbil alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Keapatuhan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Restoran“

Ucapan trimakasih penulis samapikan kepada ibuku Hasibah dan saudara-saudaraku yang telah mendidik dan memberikan semangat dan motivasi kepada penuli, dan juga penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,Ak.,M.Si.,CA. Dan Bapak Muhammad Fahmi S.E.,M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran dengan tulus dan ikhlas, serta selalu memberikan motivasi kepada penulis arti dari kesabaran dan ketelitian dalam penulis skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu dalam menyelesaikan skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr.H.Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf karyawan/karyawati.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,AK.,M.Si.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mizan,S.E.,AK.,M.Si selaku Pembimbing Kedua saya.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pimpinan beserta staf dan karyawan-karyawati dinas Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD).
7. Mama & Papa, Terima kasih Motivasi yang kalian beri sampai detik ini saya bisa menjadi seorang sarjana berkat Mama & Papa,trimakash banyak atas pengorbanan nya selama ini.
8. Kedua saudaraku Ayunda Kelvia Oktari dan Adinda Kelvina Anggelin terima kasih telah memberikan dukungan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ku ini

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal ibadah yang kita lakukan mendapat keridhohan dari Allah SWT.

Waslamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Februari 2019

Penulis,

Kelfani

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN DEPAN | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO | v |
| HALAMAN PRAKATA | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| ABSTRAK | xvii |
| ABSTRACT | xviii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Landasan Teori | 10 |
| B. Penelitian Sebelumnya | 27 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 31 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 32 |
| C. Operasionalisasi Variabel | 32 |

| | |
|---|----|
| D. Data Yang Diperlukan | 32 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 33 |
| F. Analisis Data dan Teknik analisis..... | 34 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Hasil Penelitian | 36 |
| B. Pembahasan Hasil Penelitian | 57 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Simpulan | 66 |
| B. Saran | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|----------------|
| I.1 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Palembang 2013-2017 | 6 |
| IV.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Palembang 2013-2017..... | 63 |
| IV.2 Perhitungan Rasio Efisiensi Dinas Perhubungan Kota Palembang 2013-2017..... | 64 |
| IV.3 Perhitungan Rasio Efektivitas Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun Anggaran 2013-2017 | 66 |
| IV.4 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun Anggaran 2012-2017 | 67 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Surat Selesai Pengambilan Data
2. Lampiran 3 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
3. Lampiran 4 Sertifikat Membaca Al-Qur'an
4. Lampiran 5 Sertifikat Toefel
5. Lampiran 6 Biodata Penulis

ABSTRAK

Kelfani/222014235/2019/Analisis Anggaran Kinerja Sektor Publik Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang/Akuntansi Sektor Publik

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yaitu bagaimana anggaran kinerja sektor publik pada Dinas Perhubungan Kota Palembang dan Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana anggaran kinerja sektor publik pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. Variabel dalam penelitian ini adalah anggaran kinerja sektor publik. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa target dan realisasi anggaran kinerja sektor publik masih rendah dari pada target yang sudah di tetapkan. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi dalam dinas perhubungan kota palembang misalnya ada beberapa target pendapatan yang kurang efektif,hal ini disebabkan penurunan terhadap retribusi, sedangkan tidak efisien itu dikarenakan belanja modal dan belanjaoperasi dinas perhubungan kota palembang tidak sesuai dengan realisasi pendapatan.

Kata kunci : Anggaran kinerja sektor publik.

ABSTRACT

Kelfani / 222014235/2019 / Public Sector Performance Budget Analysis at the Palembang City Transportation Agency / Public Sector Accounting

This research was conducted to answer the problem, namely how the public sector performance budget on the Department of Transportation of Palembang City and the aim was to find out the public sector performance budget at the Transportation Office of Palembang City.

This type of research is descriptive research. This research was conducted at the Transportation Office of the City of Palembang. The variable in this study is the public sector financial performance budget which is measured using the effectiveness ratio, efficiency ratio and income growth ratio. Data collection techniques are documentation techniques. The analysis technique used is quantitative analysis.

The results of the authors' research indicate that the Transportation Agency of Palembang City in 2013-2017 was in a less effective condition. Measuring the performance budget using the efficiency ratio was obtained that the Palembang City Transportation Agency in 2013-2017 was inefficient conditions. Measuring the performance budget using the income growth ratio is obtained that the revenue growth in the Palembang City Transportation Agency in 2013-2017 is considered still not good. The ineffective and inefficient nature of the Palembang City Transportation Agency is caused by the presence of unacceptable regional retribution and an increase in expenditures, while local revenues actually decline.

Keywords: Public Sector Financial Performance Budget

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini pemerintah telah menerapkan sistem penganggaran dengan sistem anggaran berbasis kinerja. Sebelum sistem anggaran berbasis kinerja diberlakukan, pemerintah menggunakan sistem anggaran tradisional, yang mana sistem ini lebih menekankan pada biaya bukan pada hasil/kinerja. Sistem anggaran tradisional ini dengan penyusunan anggaran yang bersifat *line item budget*, yang mana proses penyusunan anggarannya berdasarkan pada realisasi anggaran tahun sebelumnya, dengan demikian tidak ada perubahan yang signifikan atas anggaran tahun berikutnya

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Dengan demikian, anggaran merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah untuk mengestimasi kinerja yang ingin dicapai nantinya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Keuangan Negara Pasal 19 ayat (1) dan (2) yang berbunyi dalam rangka penyusunan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku pengguna anggaran menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai (Nanda, 2016:327).

Akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik memiliki peran utama dengan memberikan informasi Akuntansi yang relevan dan handal kepada

pimpinan untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Anggaran atau sejumlah uang yang diperuntukkan untuk dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program dalam organisasi pemerintahan juga perlu direncanakan. Dengan adanya Akuntansi pertanggungjawaban, pimpinan dapat mendelegasikan wewenang dan tanggungjawab ke tingkat manajemen di bawahnya dengan lebih efisien tanpa memantau secara langsung seluruh kegiatan organisasi (Mandak, 2013:466).

Organisasi dapat diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Organisasi sebagai suatu sistem kegiatan yang dikoordinasikan secara sadar di antara dua orang atau lebih. Organisasi menggunakan tanggungjawab dan pengambilan keputusan untuk mengarahkan pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi (Novitasari, 2017:9).

Jika melakukan proses pengendalian biaya, manajemen suatu organisasi harus melakukan perbandingan secara terus-menerus biaya yang terjadi antara perencanaan dan pelaksanaan yang terjadi. Dari hasil membandingkan antara program atau anggaran yang telah disusun, manajemen akan dapat melakukan penilaian atas suatu efisiensi usaha pada organisasi tersebut. Anggaran dapat memberikan aspek motivasi bagi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.

Anggaran sering digunakan untuk menilai kinerja dari pimpinan pusat pertanggungjawaban. Dalam proses perencanaan atau anggaran biaya dan pelaksanaan atau realisasi biaya, pimpinan organisasi dapat menilai kinerja dari pimpinan suatu pusat pertanggungjawaban apakah mendapatkan penghargaan atau hukuman sesuai dengan prestasi (Mandak, 2013:466).

Berdasarkan anggaran berbasis kinerja, pemerintah daerah terlebih dahulu harus memiliki renstra (perencanaan strategis) yang disusun dengan objektif dan juga melibatkan seluruh komponen yang ada didalam pemerintahan. Dengan adanya sistem tersebut pemerintah daerah diyakini akan dapat mengukur kinerja keuangannya yang tergambar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Aspek yang diukur didalam penilaian kinerja pemerintah daerah salah satunya adalah aspek keuangan yang berupa ABK (Anggaran Berbasis Kinerja).

Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang menekankan pada prestasi kerja atau hasil. Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi dan misi serta perencanaan strategis organisasi. Sistem penganggaran ini mengaitkan langsung antara *output* dengan *outcome* yang ingin dicapai yang disertai dengan penekanan terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran yang dialokasikan. Anggaran berbasis kinerja dianggap penting, karena anggaran berbasis kinerja diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat, meningkatkan efektivitas pembangunan dan memperbaiki tata kelola keuangan dan pemerintahan yang lebih baik (Nanda, 2016:327-328).

Menurut tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan yang mempunyai beberapa arti, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat dipertanyakan, yang dapat dipersalahkan, dan

yang mempunyai ketidakbebasan termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan (Mandak, 2013:466).

Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang. Dibentuknya Dinas Perhubungan Kota Palembang tidak serta diikuti oleh perubahan instansi, melainkan juga tahapan-tahapan instansi. Berawal dari terbentuknya Dinas Lalu Lintas Angkatan Jalan (LLAJ) Palembang I, berubah menjadi Dinas Lalu Lintas Angkatan Jalan Raya (LLAJR) Wilayah I, berubah menjadi Cabang Dinas I Lalu Lintas Angkatan Jalan Raya (LLAJR) Tingkat II Kotamadya Palembang.

Dinas perhubungan kota Palembang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan, kedudukan, tugas, pokok, fungsi, dan struktur organisasi dinas daerah. Dinas perhubungan adalah salah satu dinas daerah kota Palembang mempunyai tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi dinas daerah kota Palembang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi sesuai dengan lingkup tugasnya. Dinas perhubungan kota Palembang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif, memuat program-program pembangunan sarana dan prasarana masyarakat yang akan dilaksanakan oleh dinas serta mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu lima tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2013 serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang keuangan negara telah menetapkan penganggaran berbasis kinerja dalam proses penyusunan anggaran. Disebutkan bahwa hal yang terpenting dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah

dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja, karena penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja yang ingin dicapai.

Berdasarkan tahun 2006, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan lagi peraturan mengenai ketentuan penerapan anggaran berbasis kinerja ini melalui Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 13 tahun 2006 dan telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan kemudian diubah lagi dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Didalam peraturan ini disebutkan tentang penyusunan RKA SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Anggaran berbasis kinerja menuntut adanya *output* yang optimal atau pengeluaran yang dialokasikan, sehingga pada setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomis, efektif dan efisien pada saat pelaksanaan dan pencapaian suatu *outcome* (hasil) (Nanda, 2016:328).

Hal ini menegaskan bahwa Dinas Perhubungan Kota Palembang telah mengupayakan pelaksanaan anggaran, yang sesuai dengan prosedur. Sehingga masyarakat tidak hanya dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan, sehingga Dinas Perhubungan Kota Palembang berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada. Berikut ini adalah data pendukung Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Tabel I.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Perhubungan
Kota Palembang 2014-2017

| Tahun | Anggaran | Realisasi | Persentase |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2013 | 15.597.000.000,00 | 13.986.324.123,67 | 89,67% |
| 2014 | 17.106.550.000,00 | 7.039.928.913,34 | 41,15% |
| 2015 | 15.926.550.000,00 | 15.442.360.528,00 | 96,96% |
| 2016 | 23.356.700.000,00 | 15.535.743.775,00 | 66,52% |
| 2017 | 18.110.000.000,00 | 13.064.346.640,00 | 72,14% |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2018

Berdasarkan Tabel I.I di atas dapat dilihat bahwa anggaran pendapatan Dinas Perhubungan Kota Palembang tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang dari tahun 2014-2017. Realisasi anggaran tidak tercapai maksimal disebabkan oleh berkurangnya (bus kota, bus AKAP dan bus AKDP masuk terminal), berkurangnya (sewa petak, loket, kios sejak diberlakukan Perda No. 17 tahun 2011 tentang besarnya uang sewa loket, petak dan kios), masi banyak trevel gelap, tidak dilakukan lagi pungutan retribusi angkutan barang di luar terminal, pembangunan LRT menyebabkan menutup beberapa titik parkir, adanya juru parkir dan parkir ilegal, pemasangan gorong-gorong/pipa PGN, menurunnya jumlah kendaraan yang parkir dibebrapa lokasi parkir karena faktor iklim hujan (cuaca), toko tutup, adanya oknum yang tidak mempunyai kepentingan dan wewenang dalam pemungutan retribusi parkir khususnya premanise yang terjadi pada saat petugas melakukan pemungutan retribusi parkir, pemungutan retribusi sandar dilakukan oleh pihak ketiga (perorangan) dengan sistem target, banyaknya penumpang umum yang beralih ke mobil pribadi dan motor, kurangnya kesadaran dari pemilik kendaraan (wajib uji) untuk mengujikan kendaraan secara berkala (2 kali dalam setahun), terbatasnya kewenangan dishub untuk melakukan penertiban kendaraan yang tidak baik jalan di

jalan raya, banyaknya kendaraan wajib uji domisili kota Palembang yang dimiliki oleh perusahaan dibidang pertambangan dan perkebunan.

Proses penyusunan anggaran di Dinas Perhubungan Kota Palembang dilakukan dengan menguraikan perbandingan antara biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan serta penyimpangannya. Sehingga Dinas Perhubungan Kota Palembang dapat membandingkan antara anggaran dengan realisasinya, dan dapat menilai prestasi kerja masing-masing manajer pusat pertanggungjawaban sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya standar yang telah ditetapkan dengan jelas sebagai tolak ukur penilaian prestasi kerja akan mendorong motivasi kerja para karyawan untuk bekerja lebih baik dan lebih berprestasi.

Kelemahan yang dapat dilihat adalah beberapa pegawai yang menyusun anggaran tersebut memiliki kinerja yang tidak dapat diandalkan, sehingga proses pelaksanaan anggaran tidak berjalan dengan baik, dan tidak mencapai target yang diharapkan. Sehingga mengurangi pendapatan, yang berakibat pada hasil pungutan retribusi anggaran tidak berjalan secara optimal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dan melihat pentingnya pertanggungjawaban anggaran, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Anggaran Kinerja Sektor Publik Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah anggaran kinerja sektor publik pada Dinas Perhubungan Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui anggaran kinerja sektor publik pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan, wawasan, serta pengalaman yang berguna mengenai anggaran kinerja sektor publik pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

2. Bagi Dishub Kota Palembang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan informasi tentang anggaran kinerja sektor publik pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

3. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Universitas Muhammadiyah Palembang khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya, sehingga dapat mengetahui secara rinci mengenai anggaran kinerja sektor publik pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPPN.
- Andre Mandak. 2013. *Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Pengendalian Biaya Dinas Perhubungan Manado*. Sulawesi Utara: *Jurnal EMBA*. Diakses pada tanggal 10 November 2018. dari file C:\Users\Kelfani\Favorites Download\ media.neliti.com.pdf
- Dewi Utari, Ari Purwanti dan Darsono Prawironegoro. 2016. *Akuntansi Manajemen Edisi 4*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Erna Novitasari. 2017. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: PT. Anak Hebat Indonesia.
- Fauziah Ifat, (2018). *Standar Akuntansi Pemerintahan: Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010*. Jakarta: Ilmu Media Publishing.
- Hansen, D. R., Mowen, M.M. 2009. *Akuntansi Manajerial*. Salemba Empat. Jakarta.
- Moh Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Fadhillah. 2017. *Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura*. Makassar: Universitas Hasanuddin. Skripsi Tidak Dipublikasikan.
- Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi. Program Strata I*. 2017. Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.
- Reza Nanda. 2016. *Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif Pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan)*. Daerah Istimewa Aceh: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol 1(1). Diakses pada tanggal 10 November 2018. dari file C:\Users\Kelfani\Favorites Download\ 186805.pdf
- Samryn, L.M. 2013. *Akuntansi Manajemen*. Edisi Kedua. Jakarta: PT.Fajar Interpratama.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Syofian Siregar. (2015). *Statistik Parametrik untuk penelitian kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- V. Wiratna Sujarweni. (2014). *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

